

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sampai saat ini masih terjadi konflik peperangan. Masalah konflik Israel-Palestina merupakan salah satu dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang mulai awal berdirinya Israel hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan merupakan salah satu kunci pembuka perdamaian dunia. Perang yang terjadi antara Israel dan Palestina sudah menjadi masalah Internasional hingga berakhirnya era perang dingin (*Cold War*) antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Israel dan Palestina sudah sering kali mengadakan perundingan damai, namun tidak bisa terlaksana sepenuhnya. Karena selalu dilanggar oleh salah satu negara. Sehingga konflik perang diantara kedua negara tersebut masih tetap berlanjut hingga abad ke 21.

Kebijakan politik yang diambil oleh para aktor pembuat keputusan sangat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Israel maupun Palestina. Terutama kebijakan politik luar negeri Israel yang sering kali mengabaikan teks-teks keagamaan Yahudi. Meskipun sejarah awal berdirinya Israel melegitimasi eksistensinya kepada teks-teks agama Yahudi. Sebagaimana yang tertulis dalam deklarasi kemerdekaan negara Israel bahwa Israel secara resmi menjadi

milik seluruh kaum Yahudi, dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Israel.

Konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu isu terpenting dalam politik internasional, bahkan masalah hubungan antar-agama dan perdamaian dunia. Sebab, meskipun sebuah negara kecil, tetapi tokoh-tokoh Yahudi di AS begitu kuat mencengkeram politik AS dan mengarahkan satu jenis politik internasional yang dikenal sebagai "tata dunia baru" pada era *post-communism*.

Karena itu, penting memahami perkembangan dan mekanisme politik di Israel, sebagai bagian dari usaha memahami politik global saat ini. Sebab, dari kepentingan dan kebijakan politik luar negeri Israel, dapat dibaca kemungkinan arah perkembangan politik internasional. Terutama jika dilihat dari sudut pandang adanya Israel sebagai satu-satunya negara yang mendasarkan eksistensinya pada teks-teks keagamaan Yahudi. Akan tetapi, kebijakan yang diambil seringkali mengabaikan teks-teks keagamaan Yahudi.

Berdasarkan kondisi yang penulis sebutkan diatas serta untuk memahami kondisi Israel yang merupakan negara yang secara fakta dapat dikatakan sebagai negara bagi bangsa Yahudi (*The Jewish State*) namun kebijakan yang diambil seringkali tidak menggunakan teks-teks keagamaan yahudi maka penulis menetapkan judul:

"DIDAKMATISME DALAM POLITIK LUAR NEGERI ISRAEL" sebagai

B. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah penulisan ilmiah yang senantiasa mempunyai tujuan penulisan. Maka tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah:

1. Membahas tentang awal mula berdirinya Negara Israel yang menggunakan legitimasi teks-teks keagamaan Yahudi dengan klaim teologis yang didasarkan pada teks-teks Perjanjian lama dalam kitab kejadian atas tanah Palestina. Dan zionisme politik yang dilontarkan oleh Theodore Herzl yang mengarah pada Sekuler-Pragmatis.
2. Membahas dinamika okupasi Israel terhadap Palestina yang melalui kebijakan tersebut Israel dapat menguasai sebagian besar tanah Palestina terutama seluruh Yarusalem.
3. Memahami kebijakan Israel terutama sikap pragmatis dalam politik, dari sudut kebijakan luar negerinya Israel dimasa pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon atas penarikan mundur militer dan pengusiran pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.
4. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan S-1 pada jurusan hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Israel adalah satu-satunya negara yang dalam kenyataannya merupakan satu-satunya negara bagi bangsa Yahudi (*The Jewish State*) di dunia, meskipun dikenal sebagai negara demokrasi modern, Israel tetap mengaitkan eksistensinya dengan teks-teks keagamaan Yahudi. Sebagai buah dari gerakan Zionisme, negara

Israel secara resmi menjadi milik seluruh kaum Yahudi, dimanapun mereka berada, baik dalam negeri maupun di luar negara Israel.

Negara Israel yang secara resmi diumumkan berdirinya oleh kaum Zionis Israel pada 14 Mei 1948 merupakan negara yang berpijak dari tiga sumber utama, yaitu (1) klaim teologis dan historis yang berasal dari warisan Perjanjian Lama dari Kitab Injil, (2) Deklarasi Balfour yang diumumkan Inggris Raya pada 1917, dan (3) Pembagian Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi yang direkomendasikan oleh Majelis PBB pada tahun 1947.

Berdirinya negara Israel di Palestina adalah buah dari perjuangan Zionisme. Istilah Zionisme berasal dari sebuah nama gunung "Zion" di al-Quds (Yarussalem)¹. Pada mulanya, Zionisme merupakan gerakan keagamaan murni, yang oleh Garaudy disebut sebagai "*religious Zionism*" (zionisme religius). Zionisme ini berkaitan dengan kepercayaan dalam Judaisme akan datangnya seorang "*Messiah*" (juru selamat) dari kerajaan Tuhan di Akhir Zaman, untuk mengumpulkan seluruh keluarga di bumi (kejadian 12:3). Kerajaan itu akan berpusat di tempat berlangsungnya kisah-kisah Ibrahim dan Musa. Zionisme religius inilah yang membangkitkan tradisi berziarah kaum Yahudi ke "tanah suci". Zionisme religius ini jauh dari program-program politik yang bertujuan membentuk sebuah Negara dan dominasi atas palestina². Gagasan "perlunya Negara tersendiri bagi bangsa Yahudi" mulai muncul menyusul terjadinya berbagai gerakan anti Yahudi di Eropa. Berbagai peristiwa dan gerakan anti-Yahudi di berbagai Negara Eropa itu mendorong munculnya gerakan "*Hibbat*

¹ Anonim, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*, (Terj.), Al-Ishlahy Press, Jakarta, 1995, hal 247

² B. Garaudy, *Israel dan Bangsa-Bangsa Zionisme (Geri)*, Duta, Bandung, 1999, hal 2

Zion" (*love of Zion*) yang lebih bercorak politis yang oleh Garaudy disebut sebagai Zionisme Politik³.

Klaim teologis-historis pendirian Negara Israel merujuk pada teks-teks Bible. Tokoh Zionisme politik Theodore Herzl (1860-1904) seorang wartawan Yahudi asal Austria menggariskan bahwa wilayah Israel Raya membentang dari "hulu Mesir sampai Eufrat". Sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Kejadian 15:18 menyebutkan : "*Pada hari itu tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim melalui firman, "Untuk Tuhanmu Aku berikan tanah ini, dari sungai Mesir hingga sungai bear eufrat"*. Dan pada awal tahun 1937, Ben Gurion - Perdana Menteri pertama Israel - merencanakan garis perbatasan Israel dengan menggunakan Bible sebagai rujukan. Menurutnya, Negara Israel harus meliputi lima wilayah, yaitu Lebanon selatan, Syiria selatan, Transjordania, Palestina, dan Sinai, mencakup daerah Jalur Gaza dan Tepi Barat.⁴

Berdasarkan klaim Teologis dan Historis terhadap tanah Palestina dan dukungan dari Deklarasi Balfour pada tahun 1917, maka warga Yahudi mulai menguasai wilayah Palestina. Untuk memperkuat pendudukan mereka, tokoh-tokoh Zionis juga menyebarkan opini bahwa Palestina adalah tanah air tanpa rakyat yang diperuntukan bagi (Yahudi) yang tidak bertanah air.

Selanjutnya Israel menerima keputusan pembagian wilayah Israel dan Palestina oleh PBB pada tanggal 29 November 1947. Meskipun sikap ini jelas bertentangan dengan konsep teologis tentang wilayah Erez Israel yang menurut Kitab Kejadian 15:18 yang membentang dari Nil di Mesir sampai Eufrat di Irak

Perkembangan selanjutnya, Israel mengeluarkan kebijakan dimasa pemerintahan Perdana Menteri Begin tahun 1979, yaitu dikembalikannya Gurun Sinai kepada Mesir yang dikuasai Israel pada perang 1967. sedangkan Sinai adalah bagian dari “Kerajaan Daud dan Sulaiman”, sebagaimana yang dikatakan oleh Ben Gurion dan diaklamasikan oleh Knesset pada tahun 1956.⁵

Pada tahun 2005 dimasa pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon yang sangat hawkish, terjadi penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza dan pengusiran 21 pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dan Empat pemukiman Yahudi Tepi Barat, yang diduduki Israel pada perang 1967, dan merupakan awal dari terlaksanakannya jalan damai “*Road Map*” yang digagas oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB.

Israel dalam menyerahkan Jalur Gaza dan sebagian Tepi barat kepada Palestina memunculkan terjadinya gejala-gejala kontradiksi (*paradoksial*) dalam sejarah perjalanan politik negara Israel. Pada satu sisi, Israel menyatakan dirinya sebagai Negara yang dalam kenyataannya merupakan Negara bagi bangsa Yahudi (*The Jewish State*), dengan menggunakan teks-teks keagamaanya dalam melegitimasi tindakannya seperti dalam status tanah Israel yang membentang dari Hulu Mesir sampai Eufrat Irak. Akan tetapi pada sisi lain, kebijakan-kebijakan politiknya cenderung mengabaikan teks-teks keagamaan Yahudi.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yaitu :

⁵ Ben Gurion, op. cit., 1999, hal. 111-112

“Faktor-faktor apa saja yang mendorong Israel melepaskan Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat?”

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis memberikan paparan *deskriptif analitis actual* tentang kebijakan politik Luar Negeri Israel yaitu berupa tindakan atau perilaku suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya berdasarkan kondisi dalam negeri⁶ Israel. Dan memaparkan faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kebijakan Israel yang bercorak pragmatis.

Dalam hal ini, penulis menfokuskan pada Pragmatisme dan Sekulerisme yang memunculkan korelasi positif antara ciri “sekuler” pada aktor pengambil kebijakan luar negeri dengan corak “pragmatis” pada kebijakan yang dihasilkan, dan sejumlah faktor determinan yang memiliki pengaruh terhadap pragmatisme politik luar negeri Israel.

“*Pragmatisme*” disebutkan dalam *Kamus Modern* (1994) adalah aliran filsafat yang menekankan pengamalan penyelidikan dengan eksperimen, serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan⁷.

Sedangkan dalam *Kamus politik* (2002) memberi definisi “pragmatisme” sebagai berikut : (1) Kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan, dan sebagainya) diukur dari penerapannya bagi kepentingan manusia, (2) Paham yang menyatakan bahwa

⁶ Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*, Penerbit BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1998. hal.25.

⁷ M. Dahlan, *Al-Bidayat: Kamus Modern*, Ar-Ranah, hal.527

segala sesuatu tidak tetap, melainkan tumbuh dan berubah terus, (3) Pandangan yang memberi penjelasan yang berguna terhadap suatu permasalahan dengan melihat sebab-akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis. Sedangkan “pragmatis” bermakna : 1. Bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan). 2. Mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis⁸.

Dari sejumlah definisi tentang “pragmatisme” diatas dapat disimpulkan, bahwa “pragmatisme” adalah suatu pandangan yang lebih menekankan aspek praktis ketimbang mempertimbangkan doktrin-doktrin baku yang berasal dari suatu ideologi atau teks-teks keagamaan.

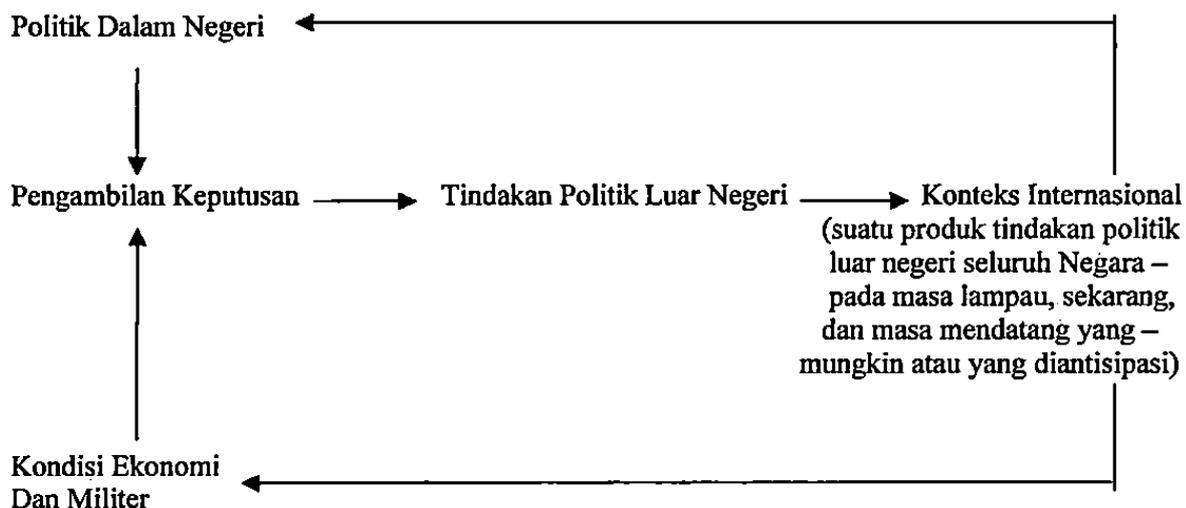
“*Sekuler*” didefinisikan oleh *Kamus politik* sebagai “bersifat duniawi dan kebendaan” (bukan bersifat kagamaan atau kerohanian). “Sekularisme” adalah “paham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Sedangkan sekularisasi adalah “ hal-hal yang membawa kearah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Dan “sekularis” adalah penganut aliran filsafat yang menghendaki agar kesusilaan atau budi pekerti tidak didasarkan pada ajaran agama⁹.

“Sekularisme” didefinisikan dalam buku *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran* (1995) adalah sebuah gerakan yang menyeru kepada kehidupan duniawi tanpa campur tangan agama. Ini berarti bahwa dalam aspek politik, pemerintahan juga berdasarkan sekularisme¹⁰.

⁸ D.N. Moekti, *SUH, Kamus Politik*, Dutaoka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 450

mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor yang disebutkan tadi berinteraksi untuk menghasilkan tindakan politik luar negeri¹¹.

Gambar



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah teoritis.

Bagan diatas dikaitkan dengan pengambilan keputusan politik luar negeri Israel mencakup:

A. Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri membawa dampak besar terhadap politik luar negeri setiap negara. Aktor-aktor politik dalam negeri mempengaruhi perilaku politik luar negeri. William D. Coplin menyebut aktor-aktor politik tersebut dengan “*policy influencers*” (yang mempengaruhi kebijakan). Pihak pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers*, karena mereka merupakan sumber dukungan bagi rezim mereka¹².

¹¹ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah teoritis, (terj.)*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hal 30.

Tipe *policy influencers* yang lain adalah opini publik atau *mass influencers* (massa yang mempengaruhi). Dalam hal ini mengacu kepada iklim opini, yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan. Termasuk *mass influencers* adalah para penyiar dan jurnalis yang menyajikan berita yang berefek “menciptakan” alam perseptual bagi pengambil keputusan¹³.

Tipe *policy influencers* yang lain adalah partai-partai politik, oleh William D Coplin disebut *partisan influencers* (partai-partai yang mempengaruhi). *Influencers* ini bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah¹⁴.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh media massa Israel dan keputusan perlemen Israel (*knessnet*) sangat berpengaruh dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan. Menurut jajak yang dilakukan oleh harian liberal *Haaretz*, hampir 69% responden mengatakan mendukung rencana PM Sharon tersebut. Hanya 28% yang mengatakan menentang rencana itu. Sedangkan jajak yang dilakukan oleh surat kabar *Yediot Aharonot* mengungkapkan 66% warga Israel juga mendukung evakuasi itu, dan hanya 26% yang akan menentangnya.¹⁵ Ini menunjukkan dukungan dan keinginan rakyat Israel atas rasa aman dan damai di Israel.

Israel menganut sistem multi partai. Partai-partai ini dapat

¹³ William D. Coplin, *op.cit.*, 2003, hal 88

¹⁴ William D. Coplin, *op.cit.*, 2003, hal 84

¹⁵ <http://www.infopolitics.com/inswell.asp?id=4078> diakses tanggal 5 April 2006

permintaan rakyatnya¹⁸.

Militer mempunyai aspek-aspek kekuatan dan kelemahan. Aspek yang pertama adalah kapasitas penggunaan kekuatan militer. Aspek ini berkaitan dengan jumlah tentara, kualitas perlengkapan, dan tingkat keterampilan. Aspek kedua adalah tingkat kebergantungan pada sumber-sumber luar negeri. Negara-negara yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi perlengkapan militer sendiri, bukan berarti sama sekali tidak bergantung pada negara lain. Aspek yang terakhir adalah ketidakstabilan internal. Kendati tugas utama kekuatan militer adalah melindungi negara terhadap serangan negara lain, peran pasukan militer yang paling penting adalah kapasitas militer dalam melihat kondisi dalam negerinya¹⁹.

Kondisi ekonomi dan militer memainkan peran penting dalam proses penyusunan kebijakan luar negeri suatu negara, dengan memberikan dukungan atau tuntutan kepada para pengambil keputusan politik luar negeri.

Meskipun kekuatan militer Israel merupakan salah satu kekuatan yang besar di daerah timur-tengah, dengan sokongan yang besar dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel. Namun, di lain pihak kondisi dalam tubuh militer Israel mengalami konflik. Terutama dari pihak perwira tinggi dan perwira rendah Israel.

Di negara manapun, meningkatnya angka kemiskinan adalah salah

... yang disebabkan oleh berbagai situasi ekonomi negara tersebut

Kaidah ini juga berlaku bagi Israel. Sejak beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak pengamat dalam negeri atau pengamat dari negara-negara pendukung Israel yang mengkhawatirkan secara serius buruknya kondisi perekonomian negara itu.

Kondisi yang terjadi dalam perekonomian Israel yang belum memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan meningkatnya pengangguran yang dan ketakstabilan internal militer Israel juga berpengaruh terhadap kebijakan Israel.

C. Konteks Internasional

Peran konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara sangatlah penting. Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional, yaitu geografis, ekonomi, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara lain²⁰.

Israel adalah satu-satunya negara bagi bangsa Yahudi yang letak geografisnya berada di timur tengah, tepatnya di daerah Sabit Subur. Kebijakan politik luar negeri Israel tidak bisa lepas dari kondisi tersebut. Suatu kondisi yang terjadi di kawasan ini pada khususnya dan Timur-Tengah pada umumnya akan berpengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Israel.

Desakan dari AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB menghendaki Israel untuk menyetujui Peta Jalan Damai "*Road Map*" demi terwujudnya perdamaian di

²⁰ William D. Coolin, *op.cit.*, 2002, hal.167

Timur-Tengah terutama antara Palestina-Israel, yang mencakup beberapa tahap, termasuk penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dan pengosongan pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Desakan ini memunculkan reaksi untuk merealisasikan evakuasi pemukiman Yahudi dan penarikan mundur pasukan Israel dari jalur Gaza agar Israel tidak terisolasi dari dunia internasional.

D. Pengambil Keputusan

Aktor pengambil keputusan politik luar negeri adalah orang-orang yang memegang peran dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan pengaruh aktual dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut keterlibatan negaranya dalam pergaulan dunia.

Ariel Sharon sebelum menjadi perdana menteri telah aktif dalam kemiliteran dan dilanjutkan pada dunia politik di Israel. Dan sepanjang Sharon berkarir di militer dan politik tangannya telah penuh bersimbah darah warga Arab-Palestina.

Sharon menunjukkan penentangannya terhadap segala bentuk solusi damai dengan bangsa Palestina. Perjanjian Camp David, Oslo dan Madrid tak lain hanyalah sebagian dari sekian banyak omong kosongnya. Wajar jika setelah berhasil naik ke kursi kekuasaan dan menjabat sebagai Perdana Menteri, Sharon menjalankan politik tangan besi dan sebisa mungkin meneror, membunuh, serta merusak rumah dan ladang warga Palestina. Salah satu kebijakan Israel di bawah kepemimpinan Ariel Sharon adalah pembangunan

dinding pemisah di Tepi Barat Sungai Jordan.

Sharon adalah orang yang yakin dengan apa yang dia lakukan dan dia selalu memikirkan betul-betul segala kebijakannya sehingga dikenal dengan seorang yang kontroversial dan bersikap pragmatis. Akan tetapi, perkembangan dan kenyataan di lapangan memaksa Sharon untuk mengubah visi politiknya, dengan menjalin perdamaian dan menerima lahirnya Negara Palestina Merdeka. Langkah yang awal dilakukan Sharon adalah mengosongkan Seluruh pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat juga seluruh militer Israel dan menyerahkan pemukiman tersebut kepada Palestina.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang yang ada dan didukung oleh kerangka pemikiran, maka penulis menarik hipotesa sebagai berikut :

1. Dukungan mayoritas rakyat Israel Atas Penarikan mundur militer Israel dan pengosongan pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat berdasarkan polling yang dilakukan oleh media massa Israel.
2. Meningkatnya kemiskinan di negara Israel dan ketidakstabilan internal militer Israel.
3. Tekanan Amerika Serikat (AS) agar menarik Penarikan mundur militer Israel dan pengosongan pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat sebagai langkah awal dari "Road Map"

11

11

11

11

11

yang dicetus oleh AS, Inggris, Rusia, PBB.

4. Perubahan garis politik PM Ariel Sharon dari “kanan” ke “moderat” serta dukungan dari mayoritas Kabinet dan Parlemen Israel (*Knesset*) yang merupakan aktor-aktor pengambil keputusan.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian skripsi ini ditetapkan jangkauan penelitian tentang kebijakan-kebijakan politik luar negeri Israel terhadap Palestina pada kurun waktu kepemimpinan Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel yang kedua kalinya yaitu pada dekade antara tahun 2003-2005, dengan menjelaskan penyebab ditariknya pasukan militer Israel dan pengusiran pemukiman Yahudi dari Jalur Gaza dan Sebagian Tepi Barat ditahun 2005. Namun, tidak menutup kemungkinan penulis mengambil diluar dekade tersebut sepanjang dianggap penting dan relevan untuk menunjang penulisan skripsi ini.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai metode kualitatif dan memanfaatkan data sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka, data yang diolah merupakan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku, koran, internet, dan dokumen serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membantu penulisan skripsi ini

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan hasil skripsi ini, maka perlu adanya penyusunan secara teratur dan sistematis. Hal ini dimaksudkan agar penyajian karya tulis ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Oleh karena itu karya tulis ilmiah ini disusun secara sistematis kedalam beberapa bab :

BAB I Pendahuluan; Memuat alasan pemilihan judul, Tujuan penelitian, Latar belakang masalah, Pokok permasalahan, Kerangka teori, Hipotesa, Jangkauan penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II Zionisme dan Berdirinya negara Israel; Membahas Zionisme dan berdirinya Negara Israel, Klaim teologis dan Historis atas Palestina, deklarasi Balfour, Pemisahan wilayah Palestina oleh PBB

BAB III Dinamika Okupasi Israel; Membahas masa-masa pendudukan Israel atas Palestina dan kondisi Jalur Gaza juga Tepi Barat serta dilepaskannya Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat oleh Israel.

BAB IV Faktor-Faktor dilepaskannya Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat; Membahas dukungan opini publik Israel, Ekonomi dan kondisi internal Militer Israel, Kontak Internasional dan aktor pembambil keputusan